KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penanganan sampah jadi prioritas nasional, Senayan dukung perbaikan tata kelola lingkungan
Tanggal : Sabtu, 02 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penanganan Sampah Jadi Prioritas Nasional

Senayan Dukung Perbaikan Tata Kelola Lingkungan

ANGGOTA Komisi XII DPR Elpisina mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas nasional. Kata dia, hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah membenahi tata kelola lingkungan.

Dia menilai, target Pemerintah untuk menuntaskan persoalan sampah dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan sebagai langkah strategis. "Ini untuk memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh di Indonesia," ujar Elpisina, dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah secara nasional. Model pengelolaan sampah seperti, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) mulai diadopsi oleh berbagai daerah.

"Pemerintah Pusat akan mendorong, dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk dikembangkan, perbaiki, dan bikin lebih efektif," ujar Prabowo di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (28/04/2026).

Elpisina melanjutkan, penyelesaian masalah sampah tidak bisa lagi dilakukan dengan pola parsial atau sporadis. Diperlukan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan pengelolaan dari hulu ke hilir. Mulai dari edukasi pemilahan di tingkat rumah tangga hingga teknologi pengolahan akhir yang ramah lingkungan.

"Masalah sampah tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan remeh karena dampaknya menyangkut kesehatan masyarakat dan stabilitas ekosistem kita," ujar politikus PKB ini.

Jika pengelolaan sampah terus berjalan seperti saat ini, risiko krisis lingkungan akan menjadi ancaman sistemik. Ini merujuk pada berbagai insiden fatal, termasuk longsor sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi, yang memakan korban jiwa. "Manajemen sampah yang buruk adalah bom waktu bagi keselamatan publik," ingatnya.

Menurut Elpisina, urgensi penuntasan sampah juga berkaitan dengan efisiensi anggaran negara. Biaya penanganan bencana lingkungan dan kesehatan akibat polusi sampah jauh lebih tinggi dibandingkan investasi pada infrastruktur pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.


FOTO: TEDY KROEN RM/RM.ID
Elpisina

Untuk memastikan target Presiden tercapai dalam tiga tahun, perlu ada sinergi dari Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Kebijakan pusat harus diterjemahkan menjadi aksi konkret di daerah, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan sendiri-sendiri. "Pembangunan fasilitas pengolahan sampah mesti jadi lebih modern dan efisien di setiap wilayah," imbuhnya.

Selain itu, ia mendorong edukasi masif kepada masyarakat untuk mulai mengelola sampah dari sumbernya yaitu rumah tangga. Pengendalian sampah harus dilakukan secara terintegrasi, bukan lagi sekadar kumpul-angkut-buang.

Dia menegaskan, komitmen bersama harus ditegakkan tanpa pengecualian. Mulailah pengendalian sampah dari rumah tangga. Pemerintah juga memfasilitasinya melalui kebijakan yang tegas, infrastruktur yang mumpuni, dan edukasi berkelanjutan.

Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik menambahkan, persoalan sampah saat ini menjadi tantangan serius di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu solusinya, Pemerintah bisa mengadopsi sistem pengelolaan sampah diterapkan di Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah (Jateng).

Dia menyatakan, teknologi pengolahan sampah yang digunakan di pulau tersebut relatif sederhana, tidak membutuhkan biaya besar, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Prosesnya pun tidak menimbulkan dampak pencemaran udara, tanah dan air. "Di sana sekarang sudah tidak ada sampah," sebut Jamaludin dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Jamaludin mengatakan, hasil pengolahan sampah tersebut juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. "Bahkan menjadi solusi untuk pupuk dan untuk netralisir air tambak," kata dia.

Ia mengaku telah meninjau langsung sistem tersebut beberapa bulan lalu dan melihat efektivitasnya secara nyata. Hasilnya, pengelolaan sampah di Pulau Nusa Kambangan sudah berjalan sangat optimal. "Sampai mereka itu kekurangan sampah," kata politikus Golkar ini.

Jamaludin menerangkan, Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai kawasan dengan sejumlah lembaga pemasyarakatan tapi justru mampu menunjukkan praktik pengelolaan lingkungan yang baik. Bahkan, hebatnya di pulau tersebut tidak ada sampah sama sekali.

Selain itu, ia berharap Pemerintah segera mengambil langkah konkret agar teknologi ini dapat diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. Ini teknologi murah dan menjadi solusi cepat. "Ketika dikerjakan bulan depan sudah bisa beroperasi," pungkasnya. ■ TIF